

Judul : Aparat diminta bertindak tegas
Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Kasus Edy Mulyadi **Aparat Diminta Bertindak Tegas**

KETUA Komisi V DPR Lasarus meminta aparat penegak hukum menindak tegas penyebar pernyataan melecehkan Kalimantan, Edy Mulyadi. Pasalnya, pernyataan Edy sangat melukai, bahkan berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

“Kami berharap, aparat penegak hukum segera menindak dan memberi sanksi tegas kepada Edy. Pasalnya, pernyataan calon anggota legislatif (caleg) gagal PKS ini melukai dan berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat,” kata Lasarus dalam Konferensi Pers di Media Centre DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Diketahui, nama Edy Mulyadi menjadi sorotan lantaran pernyataan kontroversialnya terkait lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan. Ia menarasikan IKN merupakan pasar kuntilanak dan genderuwo. “Bisa memahami nggak, ini ada tempat elite punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak,” kata Edy.

Melanjutkan keterangannya, Lasarus mengatakan, pengusutan dan proses hukum terhadap Edy akan meredam kemarahan masyarakat. “Jangan sampai, kemarahan masyarakat memuncak, dan mereka me-

milih jalannya sendiri untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tegas Anggota Fraksi PDIP ini.

Mengenai permintaan maaf Edy, Lasarus menilai, permintaan tersebut belum menunjukkan iktikad baik atas pernyataannya. Menurut dia, cara penyampaian tidak sopan, dan penjelasannya dilakukan oleh orang lain.

“Kebiasaan dan sosok Edy Mulyadi ini memang ini kontroversi, sudah berbuat salah, minta maafnya pun salah. Kali ini, ia berurusan dengan masyarakat Kalimantan. Kami tidak mau masalah ini selesai begitu saja,” tegas Ketua DPD PDIP Kalimantan Baray (Kalbar) ini.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis mengatakan, pernyataan Edy merendahkan masyarakat Kalimantan. Penyebutan Kalimantan sebagai ‘tempat jin buang anak’ dan ucapan melecehkan lainnya sangat tidak pantas dan melukai hati masyarakat.

“Ini sudah ada kebencian, mengadu domba, dan pernyataan hoaks yang tidak berdasar. Kami meminta Kapolri menindak tegas, persoalan yang masyarakat Kalimantan dan Indonesia ini,” ujar Yakobus. ■ ONI